

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN POLITIK INDONESIA: TRANSAKSIONAL ATAU TRANSFORMATIF?

Utami Dewi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY

Email: utami.dewi@uny.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum 2014 merupakan tonggak penting bagi penentuan nasib bangsa Indonesia karena melalui pemilu ini akan muncul pemimpin baru untuk lima atau bahkan sepuluh tahun mendatang. Pola kepemimpinan hasil pemilu 2014 menjadi salah satu kunci penentu kesatuan dan kedaulatan bangsa ditengah tuntutan globalisasi dan berbagai masalah disintegrasi. Paper ini bermaksud untuk melakukan refleksi pola kepemimpinan nasional Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Reformasi dalam rangka memunculkan kepemimpinan transformatif melalui pemilu 2014. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka dan diakui oleh dunia, pemimpin Indonesia memiliki karakteristik yang relatif hampir sama yaitu administrator dan transaksional. Pola kepemimpinan transformatif dan pemersatu sesungguhnya juga muncul dalam diri para pemimpin Indonesia seperti Sukarno, Suharto, Habibie ataupun para penggantinya. Namun demikian, selama kurun waktu mereka berkuasa tampaknya kepemimpinan model transaksional dengan kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan serta menguntungkan diri dan kelompoknya lebih dominan di Indonesia terutama ketika Suharto berkuasa. Oleh karena itu, melalui pemilihan secara langsung dalam pemilu 2014, rakyat Indonesia akan menentukan nasib bangsa guna memilih kepemimpinan yang ideal bagi kedaulatan negara.

Kata kunci: *pemilu, kepemimpinan, transaksional, transformatif*

Pengantar

Tak lama lagi Indonesia akan memiliki pemimpin nasional baru melalui pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 yang akan datang. Meskipun masih satu tahun lagi, namun gegap gempita menyongsong perhelatan besar pesta demokrasi ini sudah mulai terlihat saat ini. Hiruk pikuk para politikus sudah mulai kentara ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi untuk mengikuti ajang pemilihan umum tahun depan.

Sesungguhnya upaya partai politik untuk menggalang dukungan publik telah jauh hari dilakukan oleh partai politik (parpol) di Indonesia melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di seluruh pelosok negeri. Dengan terpilihnya kepala daerah dari satu partai politik tertentu diharapkan akan mampu mendulang suara termasuk mobilisasi massa untuk meraih kemenangan pada pemilu 2014. Sehingga, kemenangan Joko Widodo dan Ahok pada Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan memberi angin segar bagi kemenangan parpol pengusungnya untuk meraup kemenangan di daerah-daerah lain. Walaupun usaha parpol

tersebut kurang membuahkan kemenangan pada pilkada di daerah selain DKI Jakarta, namun geliat partai oposisi pemerintah tersebut tampaknya mulai kelihatan.

Apakah pilkada di Indonesia selama ini atau pemilu 2014 akan mampu menghasilkan pemimpin yang transformatif di Indonesia? Pertanyaan tersebut selalu mengemuka karena pesta demokrasi melalui pemilihan umum, baik pilkada atau pemilihan umum, membutuhkan dana dan mnguras energi yang luar biasa besar. Jika meleset dari harapan, kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya, bukan pemimpin transformatif yang muncul akan tetapi masalah stabilitas bangsa dan negara yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kini saatnya mengembalikan semangat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden kepada tujuan awal, yaitu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan mampu membawa perubahan (tranformatif) menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Paper ini berupaya untuk menganalisis tipe kepemimpinan di Indonesia sebagai refleksi dalam melahirkan pemimpin transformatif bagi Indonesia pada masa mendatang. Pada bagian pertama penulis akan menjelaskan karakteristik pemimpin transformatif. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden sejak masa Orde Baru hingga pasca Orde Baru menjadi paparan pada bagian kedua sementara prospek pemilu 2014 dalam melahirkan pemimpin yang transformatif menjadi analisis bagian ketiga dari paper ini. Pada bagian penutup, penulis percaya bahwa pemilu 2014 akan mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan transformatif jika seluruh lapisan masyarakat Indonesia mampu berpikir jernih dalam memilih pemimpin pilihan mereka. Bukan karena uang, tahta dan jabatan yang menjadi pertimbangan tetapi kapasitas dan kredibilitas yang menjadi tolak ukur utama dalam memilih seorang kandidat.

Kepemimpinan Transformatif: Sebuah Tinjauan Wacana

Menurut teori peran (*role theory*), setiap anggota masyarakat menempati posisi tertentu, begitu pula halnya pada lembaga-lembaga dan organisasi. Dalam hal ini Jennings (1944) memandang kepemimpinan muncul sebagai suatu cara berinteraksi yang melibatkan tingkah laku oleh dan untuk individu.

Sementara itu, berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, O'Donnel (1955) memandang kepemimpinan sebagai aktivitas membujuk manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu pemimpin juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Veithzal Rivai, 2007: 3).

Pemimpin mempunyai peran strategis dalam melakukan optimalisasi organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai organisasi. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja anggota organisasi

mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan, maupun kebijakan yang akan diambil. Pembuatan kebijakan juga memungkinkan seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja beserta solusi dalam setiap problema organisasi.

Seorang pemimpin yang ideal dituntut untuk mampu mengetahui konteks perubahan dan tantangan organisasi. Sehingga dalam diri seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk menangkap gejala sosial budaya yang ada disekitarnya. Dengan demikian perubahan yang seharusnya dilakukan dalam organisasi akan segera dapat dilakukan.

Kepemimpinan transformatif menurut Burn (1978), terkadang dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi bawahannya agar melakukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya (Venkat R. Krishnan dan Ekkirala S. Srinivas, 1998: 4). Lebih lanjut dijelaskan oleh Matthew R. Fairholm (2001: 3) bahwa kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan dimana satu orang berinisiatif untuk membuat kontak dengan orang lain dengan untuk tujuan pertukaran yang dihargai, fokus kepada imbalan atau hukuman dengan proses tawar menawar kinerja.

Sebaliknya, James MacGregor Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus mengakui (Venkat R. Krishnan dan Ekkirala S. Srinivas, 1998: 4).

Pemimpin transformasional juga mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi dan masa depan organisasi dengan bawahannya, serta meningkatkan kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. Menurut Yammaniro dan Bass (1990) pemimpin transformatif harus mampu membujuk bawahannya melakukan tugas-tugasnya melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Yammaniro dan Bass (1990) juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistis, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan yang dimiliki bawahannya. Dengan demikian seperti yang diungkapkan Tichy dan Devanna (1990), keberadaan para pemimpin transformatif mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi atau pada tingkat individu.

Lebih lanjut, Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio mengemukakan bahwa kepemimpinan, transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai *the Four I's*.

- a. Dimensi yang pertama disebut *idealized influence* (pengaruh ideal). Dimensi pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.
- b. Dimensi yang kedua yaitu sebagai *inspirational motivation* (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan

komitmennya, terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme.

- c. Dimensi yang ketiga disebut *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasi harus mampu menumbuhkan ide-ide baru memberi solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- d. Dimensi yang terakhir dalam menguraikan karakteristik pemimpin disebut *individualized consideration* (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan dan secara khusus. (Jan Stewart, 2006, hal 12).

Sesungguhnya, perbedaan antara pemimpin transaksional dan transformatif hanya salah satu perbedaan tentang tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang lain adalah pemimpin "tipe pengelola" (*administrator*) dan "tipe pemersatu" (*solidarity maker*). Menurut Feith (1962) pemimpin dengan tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang mampu mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka.

Lalu, bagaimana dengan para pemimpin di Indonesia, apakah mereka masuk dalam tipe kepemimpinan transformatif atau transaksional? Uraian berikut ini mencoba menjelaskan karakteristik pemimpin Indonesia dan kaitannya dengan pemilu.

Tipe Kepemimpinan di Indonesia

Keterkaitan antara tipe kepemimpinan dengan pemilihan umum memang tidak mudah untuk dipahami. Perbedaan sistem pemilihan umum, apakah itu sistem proporsional atau sistem distrik, dengan tipe kepemimpinan tidak serta merta akan teruji. Namun, analisis ini mencoba melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa saat pemilihan umum tersebut sedikit banyak dapat mencerminkan karakter kepemimpinan yang berkuasa masa itu. Misalnya, pemilu pertama tahun 1955 mencerminkan bagaimana karakter transformatif yang dianut oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kala itu.

Sebagai pemilihan umum pertama di Indonesia, pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum multi partai yang pertama dan diikuti oleh lebih dari 100 parpol. Pemilu pertama ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal demokrasi. Pemilu ini juga menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa saat itu tidak sekedar hanya ingin melanggengkan kekuasaannya tetapi berupaya tetap mendorong semangat perubahan untuk kepentingan organisasi. Pada pemilu ini setiap individu berhak untuk mengikuti pemilu melalui kebebasan untuk mendirikan partai politik. Walaupun pemilihan presiden belum dilakukan secara langsung, tetapi diyakini oleh banyak pengamat politik bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis di Indonesia.

Berkaitan dengan pola kepemimpinan masa ini, Feith dalam bukunya *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962), menyebutkan bahwa Muhammad Hatta selaku wakil presiden merupakan pemimpin dengan tipe pengelola, sementara Presiden Soekarno

merupakan pemimpin tipe pemersatu. Dua karakter kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Para pemimpin dengan tipe pemersatu biasanya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil mempengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tapi kurang mendapat dukungan dari rakyat. Karena kurang menguasai retorika atau tak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa, tipe pemimpin pengelola biasanya sering disalahpahami orang. Tentu saja, yang ideal adalah jika kedua karakter ini bersatu dalam satu tokoh.

Berkaitan dengan jenis kepemimpinan yang lain, transformatif-transaksional, Soekarno, menurut Liddle, adalah jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari satu fase (penjajahan) kepada fase lain (kemerdekaan). Namun demikian, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional Soekarno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tak lagi punya visi transformatif (Muhammad, 2013).

Pasca pemilu 1955-1965, tampuk kepemimpinan berada di tangan Sukarno. Dengan kemampuan Sukarno sebagai orator yang handal, beliau mampu mendapatkan dukungan dari rakyat selain kemampuan Sukarno untuk meredam gejolak disintegrasi bangsa yang mulai mengancam kedaulatan RI saat itu. Namun demikian, Sukarno kurang berhasil dalam mengelola pemerintahan apalagi ketika terjadi “frikasi” antara Sukarno dan Hatta kala itu. Kemampuan administrator Hatta dalam mengelola pemerintahan kala itu, mulai ditinggalkan Sukarno yang tampak mulai melenggang menjadi pemimpin tunggal setelah mengadopsi demokrasi terpimpin.

Kekuasaan Orde Lama dibawah kepemimpinan Sukarno runtuh ketika meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui G 30 S/PKI yang menurunkan Sukarno dari kursi kepresidenan. Selanjutnya masa Orde Baru dengan kendali Suharto mulai berkuasa sejak tahun 1967 ketika Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di mandatkan kepada beliau. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, selama masa Orde Baru telah dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pemilu pertama, tahun 1971, diwarnai oleh munculnya serangkaian peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengamankan perolehan suara Golongan Karya (Golkar) di mana Presiden Suharto berperan sebagai Dewan Pembina (Imawan, 1997). Peraturan tersebut adalah permendagri No 12/1971 dan *Floating mass policy* yang bertujuan untuk menggiring massa pemilih dalam memilih partai peserta pemilu tahun 1971.

Pemilu kedua, 1977, pemerintah sudah tidak secara langsung melakukan intervensi ke partai politik. Ciri penting dari pemilu 1977 adalah menurunnya jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari 10 di tahun 1971 menjadi 3 OPP di tahun 1977 sebagai kelanjutan dari fusi partai pada tahun 1973. Pada satu sisi, fusi partai merupakan kelanjutan dari tekad bangsa untuk menyederhanakan kehidupan partai melalui Tap XXII/MPRS/1966 yang ditegaskan lagi dalam TAP XXII/MPR/1973. Partai telah divonis sebagai sumber terjadinya instabilitas politik pada masa Orde lama dan awal Orde baru. Pada sisi yang lain, penyederhanaan partai ini telah menurunkan kuantitas konflik, tetapi meningkatkan kualitas konflik di antara partai yang melakukan fusi (Imawan, 1997). Misalnya, konflik terjadi di antara partai-partai berideologi Islam yang berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pemilu ketiga tahun 1982 ditandai dengan upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak partai politik dengan mewajibkan semua OPP mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orpol dan Organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, PPP dan Partai demokrasi Indonesia (PDI) tidak mampu lagi menunjukkan jati dirinya dengan

menganut ideologi Islam dan nasionalis. Hal ini menghilangkan “label” yang selama ini sudah melekat pada dua parpol tersebut, sehingga mereka tidak mampu lagi menjual ide-ide mereka.

Pemilu selanjutnya yaitu tahun 1987, 1992 dan 1997 nyaris tanpa gejolak di masyarakat dengan kemenangan Golkar secara mutlak pada setiap pemilu. Golkar meraih lebih dari 75% suara di lembaga legislatif yang menempatkan orang-orang dekat Presiden Suharto di tampuk kekuasaan dengan menguasai lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Alhasil, yang terjadi di Indonesia adalah kepemimpinan otoriter di bawah Suharto sebagai Presiden serta disokong oleh kekuasaan militer pada lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat nasional maupun lokal dan pengusaha di lini sektor ekonomi.

Kepemimpinan masa Orde Baru menghasilkan pola kepemimpinan transaksional dimana pemimpin berusaha untuk menjalankan roda kepemimpinannya sebagai bentuk transaksi terutama untuk melanggengkan kekuasaannya serta kelompok-kelompok pendukungnya. Alhasil Suharto mampu berkuasa selama 32 tahun melalui berbagai kebijakan yang disusun selama Orde Baru. Namun demikian, dalam tingkat tertentu Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya. Suharto juga memiliki kemampuan mengelola pemerintahan yang mumpuni. Kemampuan administrator yang andal ditunjukkan beliau melalui serangkaian kemajuan Indonesia di bidang ekonomi dan stabilitas politik nasional.

Secara ekonomis, Indonesia memang mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan ekonomi sehingga sering disebut sebagai macan Asia Tenggara. Namun demikian, hasil pembangunan ekonomi ini seperti api dalam sekam yang akan meledak setiap saat jika kondisi ekonomi negara memburuk. Hal ini menjadi kenyataan, ketika krisis ekonomi melanda Asia khususnya Asia Tenggara dan begitu besar dampaknya di Indonesia, masyarakat bak macan yang menginginkan kebebasan.

Krisis ekonomi multi dimensi tersebut telah menyebabkan Orde Baru kehilangan kepercayaan masyarakat yang berakibat pada jatuhnya rezim yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun tersebut. Orde Baru runtuh pada tahun 1998, setahun setelah Suharto menduduki kursi kepresidenan sebagai hasil dari kemenangan Golkar pada pemilu 1997. Karakter kepemimpinan Suharto yang berwibawa, kalem dan *njawani* ternyata tidak mampu meredam gejolak sebagian besar masyarakat yang menuntut perubahan pada masa itu. Hal ini ditandai dengan mundurnya beberapa orang kepercayaan beliau dari kursi kabinet bentukan Suharto pasca pemilu 1997. Bahkan pasca Suharto turun dari kursi kepresidenan dan menyerahkannya kepada B.J Habibie selaku Wakil Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan nasional hingga tahun 2002 pun gagal mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Habibie dianggap masih memiliki keterikatan dengan Orde Baru dan tuntutan rakyat saat itu adalah untuk segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Alhasil, pada tahun 1999 diselenggarakan pemilihan umum pertama pasca mundurnya rezim Orde Baru.

Di bawah kepemimpinan Habibie yang cukup singkat, Habibie berusaha memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin transformatif. Dengan kekuasaan yang tiba-tiba didapatkannya (setelah mundurnya Soeharto), dia tidak tampak berusaha mempertukarkannya dengan imbalan yang dapat memperpanjang usia kekuasaannya. Menurut Liddle, Habibie seperti sebuah lilin yang kebijakan-kebijakannya memberikan jalan bagi demokrasi dan kebebasan di Indonesia tapi kebijakan-kebijakannya itu membuat Habibie tidak terpilih lagi dalam pemilu 1999. Berbagai kebijakan yang dihasilkan misalnya memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk melakukan referendum apakah memilih bergabung dengan Indonesia atau berdiri menjadi negara sendiri. Alhasil, Timor Timur lepas dari Indonesia berdasarkan hasil referendum tersebut.

Selain itu, kebijakan Habibie yang transformatif juga tampak ketika tuntutan diadakannya pemilihan umum mengemuka. Bahkan pemilu masa Habibie dikatakan merupakan pemilu demokratis kedua setelah pemilu 1955 dengan mengadopsi sistem multi partai. Pemilu 1999 merupakan pemilu multi partai yang pertama pasca keruntuhan Orde Baru. Pada pemilihan ini, sebanyak 48 partai politik yang mengusung berbagai ideologi turut meramaikan proses demokrasi dalam rangka memilih pemimpin ideal untuk Indonesia saat itu. Pemilu 1999 dengan sistem multi partai membawa konsekuensi pada munculnya banyak fraksi di lembaga legislatif. Partai-partai politik baru yang merupakan bentukan *orang lama* mampu muncul ke permukaan sebagai kuda hitam, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam hal kepemimpinan, pemilu 1999 mampu memunculkan pemimpin baru di Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarno Putri sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua pemimpin tersebut merupakan tokoh yang pada masa kepemimpinan Suharto mendapatkan pembatasan ruang gerak. Sebagai tokoh agama sekaligus keturunan pendiri Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selalu dianggap ancaman bagi kepemimpinan Suharto. Begitu juga dengan Megawati, sebagai putri *the founding father* sekaligus presiden RI yang pertama, beliau selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif pada masa Orde Baru berkuasa. Perlakuan tidak adil sering dialami oleh Megawati misalnya saat pemilihan ketua umum partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kepemimpinan Suharto mampu memunculkan kekuatan tandingan dalam tubuh PDI hingga memunculkan Surjadi sebagai Ketua umum terpilih PDI untuk menghalangi naiknya Megawati.

Runtuhnya kepemimpinan Suharto telah memberikan ruang demokratisasi yang lebih pada masa itu terutama dalam kebebasan berpendapat, berafiliasi dan berpolitik. Tidak hanya berhenti dalam bidang eksekutif, dalam lembaga legislatif pun muncul pemimpin-pemimpin baru yang nota bene merupakan para pengkritik rezim Orde Baru. Dalam lembaga legislatif Amien Rais menjabat sebagai Ketua MPR/DPR sebagai hasil dari pemilu 1999. Kepemimpinan masa ini tampaknya lebih merupakan tipe pemimpin transaksional, yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Selain itu, kepemimpinan pasca Orde Baru merupakan tipe pemimpin “administrator” atau pengelola dan “transaksional” yang berusaha mempertukarkan kekuasaan untuk mendapatkan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Ketika roda kekuasaan bergulir kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih melalui pemilihan umum 2004 serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2009, tampaknya pola kepemimpinan belum berubah secara signifikan. Tipologi kepemimpinan transaksional dan pengelola masih kental mewarnai gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono maupun wakil-wakilnya yaitu Jusuf Kalla dan Budiono. Jusuf Kalla barangkali dinilai memiliki sedikit prestasi terutama dalam mengubah pola pengambilan keputusan yang relatif cepat dan transformatif jika dibandingkan dengan para wakil presiden sebelumnya yang dianggap kurang memiliki *power* dan berada di bawah bayang/bayang presiden dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tampaknya selama ini kepemimpinan di Indonesia masih didominasi oleh kepemimpinan tipe administrator dan transaksional, sangat jarang terjadi kepemimpinan yang mampu menunjukkan sikap pemersatu dan transformatif. Hal ini berlaku di hampir semua level pemerintahan dan birokrasi baik dari level pusat maupun daerah, bahkan hingga dalam tubuh partai politik.

Penutup

Pemilihan Umum 2014 dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengubah pola kepemimpinan terpilih Indonesia untuk menjadi lebih transformatif. Ada beberapa tokoh yang saat ini menjadi perhatian publik berkaitan dengan gaya kepemimpinannya yang dinilai transformatif dan berupaya mengubah keadaan tanpa selalu memikirkan keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya, misalnya seperti terlihat pada sosok Joko Widodo, Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Dahlan Iskan, Anies Baswedan dan tokoh-tokoh lain. Mereka menjadi calon kandidat yang diprediksikan akan muncul dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014.

Untuk menentukan apakah pemimpin hasil pemilu 2014 adalah pemimpin transformatif, tentunya kita dapat menilai setelah sang pemimpin menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi untuk memunculkan pemimpin yang transformatif tentunya dapat dilihat dari kemampuan dan prestasi yang telah mereka raih selama ini. Oleh karena itu pemilu 2014 menjadi perhelatan yang sangat penting dalam menentukan nasib bangsa ditengah derasnya arus globalisasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan. Yang saat ini dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang transformatif, yang senantiasa berupaya memajukan bangsa dan tidak mementingkan kelompoknya demi kesatuan dan kedaulatan negara. Jika salah dalam memilih pemimpin, bisa jadi Indonesia akan menjadi jauh terbelakang dibanding negara-negara lain atau bahkan menjadi terpecah belah karena permasalahan disintegrasi bangsa.

Daftar Pustaka

- Fairholm, Matthew R 2001, *The Themes and Theory of Leadership James MacGregor Burns and the Philosophy of Leadership*, Working Paper CR01-01, Center for Excellence in Municipal Management, Center for Excellence in Municipal Management
- Immawan, Riswanda 1997, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Krishnan, Venkat R. and Ekkirala S. Srinivas 1998, *Transactional and Transformational Leadership An Examination Of Bass's (1985) Conceptualization In The Indian Context*, Paper presented at Asia Academy of Management Meeting, Hong Kong, Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur, India.
- Muhammad, Gunawan (ed) 2012, *Calon Presiden Kita*, Jakarta, Majalah Indonesia 2014
- Rivai, Veithzal 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada.
- Stewart, Jan 2006, Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood, *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #54, June 26.
- Western, Simon 2008, *Leadership A Critical Text*, London, Sage Publication.

